

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN *E-BUDGETING* DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH ACEH

(Factors that Influence E-Budgeting Implementation to Achieve a Good Governance in Aceh Local Government)

Almuttaqin*, Nunung Kusnadi**, dan Widyastutik***

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680

*Email: almuttaqin_rasyidy@yahoo.com, **Email: nkusnadi@apps.ipb.ac.id, dan ***Email: widyastutik@apps.ipb.ac.id

Naskah diterima: 02 Maret 2021

Naskah direvisi: 26 April 2021

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

Abstract

Regional autonomy requires a bureaucratic reform in financial management by implementing good governance principles to improve government performance and accelerate regional development goals. During the 4.0 digitalization industrial era, information systems can be designed to support media, such as e-budgeting used by the Aceh Local Government. E-budgeting plays a role in the punctuality of the Ratification of the Aceh Regional Budget in 2020. However, the Bureaucratic Reform Index Realization did not increase, and even the Transparency Index decreased last year. This study aims to determine some factors that influence e-budgeting implementation. The study population was 47 Aceh Local Government Agencies (SKPA) as analysis units. The data collection technique used online questionnaires and interviews with 67 respondents via a google form. Descriptive analysis toward the implementation of e-budgeting in SKPA indicates good performance. Aceh Government e-budgeting implementation achieves the highest value on effectiveness principle and the lowest on transparency principle. The technique of multiple linear regression analysis was used at the 0.05 significance level. Results of the simultaneous test show a significance value of 0.042; thus, it can conclude that at least one independent variable affects the dependent variable. The partial test results also show a significance value of 0.049 with a constant value of 3.418, and the coefficient of determination is 0.437. This study proves that direct supervisor support and the number of operators positively and significantly affect implementing e-budgeting. Meanwhile, other variables, including formal education, experience, training, and income-work balancing, also have a positive impact but are insignificant.

Keywords: e-budgeting, planning, Aceh Local Government, information system, multiple linear regression analysis

Abstrak

Otonomi daerah menuntut reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada era digitalisasi industri 4,0 saat ini, perkembangan sistem informasi dapat dirancang sebagai media pendukung, seperti *e-budgeting* yang digunakan oleh Pemerintah Aceh. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat, akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020, di mana *e-budgeting* berperan penting terhadap pencapaian tersebut. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-budgeting*. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner *online* dan wawancara kepada 67 responden melalui *google form*. Analisis deskripsi terhadap penerapan *e-budgeting* pada SKPA mengindikasikan kinerja yang bagus. Penerapan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Hasil uji serempak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dengan nilai konstanta sebesar 3,418 dan koefisien determinasi sebesar 0,437. Hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator *e-budgeting* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*, sedangkan pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Kata kunci: *e-budgeting*, perencanaan, Pemerintah Aceh, sistem informasi, analisis regresi linier berganda

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan urusan publik. *Good governance* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip dan karakteristik tertentu. Selain menjadi sikap dan tradisi baru, penerapan prinsip *good governance* juga menjadi orientasi model penyelenggaraan pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan adalah memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* (Suwanda, 2019). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting, yaitu (1) proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Asas tersebut menjadi penting sebagai adaptasi penerapan prinsip *good governance* dan (2) keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi (PP No. 12 Tahun 2019).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan otonomi daerah dan otonomi khusus kepada Aceh. Kekhususan yang diberikan pemerintah pusat tersebut ikut memengaruhi proses pengelolaan keuangan. Pada aspek politik terdapat 3 partai politik lokal (parlok) yang hanya ada di Aceh, yaitu Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Aceh (PA), dan Partai Daulat Aceh (PDA) yang merupakan suara mayoritas pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sehingga

sedikit banyaknya akan memengaruhi proses legislasi dan pengawasan anggaran. Pada aspek kelembagaan daerah juga terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) eselon II yang tidak memiliki korelasi secara langsung dengan Kementerian atau instansi vertikal lainnya, seperti Dinas Syariah Islam (DSI), Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan, Lembaga Wali Nanggroe, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah), dan Baitul Mal sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pencapaian indikator *output* dan *outcome* yang terukur agar mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pada aspek keuangan, Aceh mendapatkan alokasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dan merupakan sumber penerimaan terbesar sejak tahun 2008 hingga saat ini proporsi penerimaan Aceh dari sumber dana Otsus rata-rata sebesar 57,64 persen per tahun (Tabel 1). Pertumbuhan realisasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus setiap tahun juga menunjukkan tren peningkatan. Pengelolaan keuangan daerah, apalagi dalam jumlah yang besar, haruslah diimbangi dengan perbaikan tata kelola keuangan yang baik.

Pemerintah Aceh sampai dengan tahun anggaran 2019 menggunakan sistem informasi e-rencana milik Pemerintah Aceh untuk aplikasi perencanaan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) milik Kementerian Dalam Negeri untuk aplikasi penganggaran dan penatausahaan keuangan. Selama penggunaan kedua sistem informasi tersebut banyak ditemukan kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak terintegrasinya sistem informasi e-rencana dan SIPKD sehingga sering ditemukan perbedaan antara *output* perencanaan dengan penganggaran. Lambatnya server kedua aplikasi juga ikut menyebabkan kelemahan dalam pengoperasian. Koneksi yang belum terhubung dengan sistem informasi lain, seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Aset, Sistem Monitoring dan Evaluasi, dan sistem informasi lainnya sebagai kelanjutan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua aplikasi sebelumnya juga tidak menyediakan harga satuan yang terintegrasi

Tabel 1. Proporsi Penerimaan terhadap Pendapatan Aceh Tahun 2012-2019 (Persen)

Jenis Penerimaan	Proporsi terhadap Pendapatan Aceh								Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pendapatan Asli Aceh	9,82	12,42	14,92	16,88	16,66	15,9	15,39	14,45	14,56
Dana perimbangan	25,71	25,07	21,99	13,37	12,72	26,57	24,36	24,35	21,77
Dana Otsus	59,65	58,31	58,8	60,42	62,33	55,69	54,34	51,59	57,64
Lain-lain pendapatan Aceh yang sah	4,82	4,2	4,3	9,32	8,29	2,1	5,92	9,62	6,07
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019 dan BPS (2020).

dengan sistem melainkan dengan melihat referensi pada SBU dan harga satuan yang manual sehingga menyebabkan harga untuk suatu barang yang sama pada satu SKPA dengan SKPA lainnya dapat berbeda.

Disamping itu, juga ditemukan berbagai kesulitan lainnya yang menghambat percepatan proses pada tahapan perencanaan yang pada akhirnya akan menyebabkan keterlambatan pengesahan pada setiap tahun anggaran. Kelemahan tersebut juga ditambah lagi seringnya terjadi kesalahan penginputan pada tahapan penganggaran, karena sistem informasi tidak dirancang untuk mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap kesalahan *entry*. Apabila proses perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah tidak berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka program dan kegiatan yang sudah direncanakan akan mengalami penundaan hingga menunggu tahapan revisi atau perubahan anggaran dapat dilakukan. Keadaan ini mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran. Apabila kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut harus dibatalkan karena tidak direncanakan dengan baik maka perhitungan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun akan semakin bertambah. Selain itu, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tidak memiliki menu khusus pada SIPKD ikut mengakibatkan pengelolaannya menjadi kurang tertib dan menimbulkan risiko kemungkinan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini pada gilirannya akan berpengaruh lebih luas terhadap pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta berdampak secara makro bagi pertumbuhan ekonomi. Kelemahan yang sama juga ditemukan oleh Suryaningrat & Utama (2018) ketika melakukan penelitian pada SIPKD milik Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Pemerintah Aceh memiliki atensi khusus terhadap reformasi birokrasi dan berupaya menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* serta menjadikan perbaikan tata kelola pemerintah sebagai agenda prioritas Pemerintah Aceh yang dijabarkan dalam visi dan misi Pemerintah (Pemerintah Aceh, 2019b). Bersamaan dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi selama era digitalisasi industri 4,0, sistem informasi telah banyak dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu metode dalam meningkatkan kualitas *good governance*. Penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh nyata dan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD, bahkan pengaruhnya lebih dominan dari pada sistem pengawasan melekat

(Fajri et al., 2019). Pemerintah Aceh, oleh karenanya merancang sebuah Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan (*e-budgeting*) berbasis *web* yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi *e-budgeting*. *E-budgeting* secara resmi digunakan pertama kali pada 9 April 2019 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2020. *E-budgeting* merupakan suatu sistem informasi melalui aplikasi program yang berbasis *web* untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran keuangan pada pemerintah daerah (Rahman et al., 2018).

E-budgeting menggunakan standar satuan harga yang merupakan harga satuan tertinggi. Standar satuan harga ini dipergunakan oleh SKPA di Aceh sebagai standar harga satuan pekerjaan dalam perencanaan dengan melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, *Detail Engineering Design* (DED), dan gambar bangunan atau barang. Dengan digunakannya standar harga satuan diharapkan memiliki keluaran yang jelas dan terukur serta memiliki keseragaman antar-SKPA dalam lingkup Pemerintah Aceh. Selain itu, *e-budgeting* menerapkan tingkat level pengguna dengan menggunakan kata sandi sesuai kewenangannya masing-masing. Akses terbatas juga dapat diberikan kepada lembaga legislatif dengan harapan menjadi *people control* dalam pengawasan lajunya pembangunan di Aceh. Sistem *e-budgeting* memiliki beberapa keunggulan terutama pada aspek efektivitas pekerjaan dan efisiensi biaya sehingga pekerjaan dengan jumlah yang relatif banyak dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang lebih cepat oleh sedikit personil saja serta mempermudah perolehan data standar satuan harga secara akurat.

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 yang satu dekade sebelumnya selalu terlambat akhirnya dapat dilaksanakan tepat waktu, yaitu 30 November 2019 (Permendagri No. 33 Tahun 2019) atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan di mana *e-budgeting* diyakini telah memainkan peran penting dalam mendorong percepatan pengesahan anggaran dimaksud (Tabel 2). Keberhasilan tersebut patut diapresiasi dalam hal waktu (*timing*) pengesahan anggaran yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun Indeks Reformasi Birokrasi Aceh Tahun 2020 yang direalisasikan tidak mengalami peningkatan dari tahun lalu 2019, yaitu masih sebesar 61,47 atau 97,50 persen dari target yang direncanakan, yaitu sebesar 63,04. Demikian juga dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai sebesar 0,313 atau 93,15 persen dari target yang direncanakan sebesar 0,336. Perolehan tersebut justru menurun dari tahun

Tabel 2. Waktu Pengesahan dan Pagu APBA Tahun 2012-2020

Tahun	Jenis Perda/Perkada	Tanggal pengesahan	Pagu anggaran (Rp)
2012	Qanun Aceh No. 11 Tahun 2012	31 Januari 2012	9.711.938.653.801
2013	Qanun Aceh No. 1 Tahun 2013	04 Maret 2013	11.779.837.222.010
2014	Qanun Aceh No. 13 Tahun 2013	20 Desember 2013	13.368.028.474.729
2015	Qanun Aceh No. 1 Tahun 2015	27 Februari 2015	12.755.643.725.149
2016	Qanun Aceh No. 1 Tahun 2016	22 Februari 2016	12.874.631.946.619
2017	Qanun Aceh No. 2 Tahun 2017	09 Februari 2017	14.733.699.981.655
2018	Pergub Aceh No. 19 Tahun 2018	7 Februari 2018	14.733.699.981.655
2019	Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018	31 Desember 2018	17.104.324.024.413
2020	Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019	23 Oktober 2019	17.279.528.340.753

Sumber: Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018, dan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019.

sebelumnya, yaitu sebesar 0,324 (Pemerintah Aceh, 2020). Oleh karenanya, menjadi hal menarik untuk diteliti selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi *e-budgeting* pada Pemerintah Aceh sebagai upaya mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disebutkan sebelumnya maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, keseimbangan penghasilan dengan beban kerja, dukungan atasan langsung, dan jumlah operator terhadap penerapan *e-budgeting*.

METODE

Lokasi, Waktu Penelitian, dan Pengumpulan Data

Kajian ini dilaksanakan di Pemerintahan Aceh dengan unit analisis SKPA lingkup Pemerintah Aceh dalam waktu empat bulan, sejak bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020. Populasi dalam penelitian adalah seluruh unit SKPA sebagai pengguna (*user*) *e-budgeting* sebanyak 47 unit. Pada setiap SKPA dipilih secara sengaja dua orang responden dengan kriteria orang yang paling mengetahui penggunaan *e-budgeting*, yaitu Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas SKPA, dan operator *e-budgeting*. Pengumpulan data dari responden dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya secara *online* melalui media *google form*. Data sekunder dikumpulkan dari setiap unit SKPA. Wawancara juga dilakukan pada beberapa SKPA terpilih. Sampai dengan batas waktu pengisian yang telah ditentukan, didapatkan jawaban yang berasal dari 34 SKPA serta 67 responden terdiri atas 32 pejabat eselon IV dan sisa 35 staf operator *e-budgeting*. Sisanya sebanyak 27 orang tidak memberikan jawaban.

Peran E-Budgeting dalam Pengelolaan Keuangan

Orientasi pembangunan pada sektor publik sesungguhnya diarahkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang ideal dan baik dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Agar keseimbangan tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan pembangunan maka perlu adanya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran, karena anggaran berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Mardiasmo *dalam* Nurhadianto & Khamisah, 2019). Oleh karenanya, berbagai reformasi birokrasi pada sektor publik sangat dibutuhkan, seperti reformasi kelembagaan, reformasi manajemen publik, reformasi penganggaran, dan reformasi sistem akuntansi (Mardiasmo, 2018). Pemanfaatan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan sebagai upaya mereformasi sistem penganggaran dan akuntansi diyakini akan memengaruhi kualitas informasi keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat. Pengelolaan keuangan dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik melalui penyajian dan pelaporan keuangan yang baik pula pada akhirnya akan memengaruhi kinerja pemerintah (Nasution, 2018). Semakin efektif penerapan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan pemerintah maka diharapkan akan memberikan banyak manfaat terutama mengenai kecepatan proses transaksi dan keakuratan pelaporan yang lebih baik serta kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar sehingga memberikan informasi keuangan yang lengkap dan relevan. Implementasi *e-budgeting* juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap transparansi keuangan daerah, di mana semakin bagus penerapan *e-budgeting*, semakin tinggi pula tingkat transparansi keuangan daerah (Nasution & Ramadhan, 2019). Selain meningkatkan

transparansi, *e-budgeting* juga menjadikan pengelolaan keuangan lebih informatif dan lebih mudah dipertanggungjawabkan (Nasution & Atika, 2019).

Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penerapan E-Budgeting

Sistem informasi sebagai suatu media pendukung diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi pada suatu organisasi. Penerapan sistem informasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sehingga suatu sistem informasi dikatakan berhasil apabila dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari pembuatan sistem informasi tersebut. *e-budgeting* adalah sistem informasi yang dirancang dengan maksud untuk memperbaiki prinsip tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik sehingga keberhasilan penggunaan *e-budgeting* seyogyanya juga dapat diukur dari sejauh mana sistem informasi tersebut dapat memperbaiki prinsip tata kelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan *e-budgeting* juga harus dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat serta membantu percepatan peningkatan kinerja organisasi pengguna, bukan sebaliknya malah menambah permasalahan administratif dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, keberhasilan penerapan sistem informasi *e-budgeting* sangat ditentukan oleh bagaimana sistem informasi tersebut dimanfaatkan oleh pengguna dalam mewujudkan tujuannya.

Sistem informasi *e-budgeting* memiliki banyak kesamaan dengan sistem informasi akuntansi pada umumnya, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang mencatat transaksi harian, merekam proses pengelolaan keuangan, dioperasikan secara *online* dan berbasis *web*, menggunakan kode rekening, bagan dan akun tertentu, memberikan laporan dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan *stakeholder* secara periodik serta berfungsi sebagai alat pengendali anggaran. Perbedaannya adalah bahwa *e-budgeting* bersifat khusus dan digunakan hanya pada akuntansi sektor publik serta proses penggunaan meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sementara Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem pelaporan keuangan umum yang dapat digunakan oleh perorangan, organisasi masyarakat, swasta, perusahaan bahkan BUMN yang pencatatannya dilakukan hanya setelah suatu transaksi terjadi atau selesai dilakukan. Ruang lingkup yang diproses dalam sistem informasi akuntansi sendiri meliputi pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan

dengan penekanan pada tujuan yang memungkinkan dilakukannya suatu penilaian komprehensif dan pengambilan keputusan yang tegas, cepat, dan jelas bagi para *stakeholder* yang berkepentingan.

Keberhasilan penerapan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan sendiri sangat berkaitan erat dengan bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh unit organisasi dalam menggunakan sistem informasi *e-budgeting*. Pada organisasi sektor publik, kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bagus dapat menjadikan proses penerapan sistem informasi lebih efektif dalam pencapaian tujuannya. Kualitas SDM tergambar dari tingkat pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan. Selain SDM, beberapa faktor lain diduga ikut memengaruhi penerapan *e-budgeting*, yaitu keseimbangan antara penghasilan dengan beban kerja, dukungan atasan langsung, dan ukuran organisasi.

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh penggunaan sistem informasi memengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi secara positif (Anjani & Wirawati, 2018). Tingkat pendidikan pengguna yang semakin tinggi akan membuat efektivitas penerapan sistem informasi semakin baik pula. Tingkat pendidikan formal merupakan serangkaian tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang melalui jalur pendidikan yang berjenjang dan terstruktur pada institusi resmi yang diakui oleh negara. Jenjang pendidikan didasarkan pada tingkat perkembangan, tujuan serta kemampuan yang akan didapatkan. Pendidikan formal di Indonesia sebagaimana diketahui memiliki beberapa jenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Setiap jenjang memiliki rentang waktu dan standar kelulusan yang berbeda-beda. Pendidikan formal pada jenjang dasar diselesaikan dalam waktu enam tahun, sementara sekolah menengah pertama atau sederajat dan sekolah menengah atas atau sederajat ditempuh selama tiga tahun. Sedangkan pendidikan tinggi Strata 1 (S-1) ditempuh selama empat tahun, S-2 selama dua tahun, dan S-3 selama lima tahun. Tingkat pendidikan formal menggambarkan tingkat pengetahuan yang diperoleh seseorang pada institusi pendidikan formal berdasarkan standar lamanya waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan tersebut.

Pengalaman adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan yang didapat dari proses pembelajaran di masa lalu dalam menjalani dan melaksanakan pekerjaan serta saling bertukar keterampilan dan pengetahuan dengan orang lain terkait bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengalaman tersebut merefleksikan kemampuan

untuk bisa melaksanakan pekerjaan sejenis secara lebih efektif. Oleh karenanya, pengalaman kerja juga memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi (Anjani & Wirawati, 2018). Pengalaman diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui praktek kerja dalam rentang waktu tertentu. Kinerja terhadap pekerjaan serupa atau sejenis di masa lalu juga dapat menjadi gambaran indikator kinerja di masa yang akan datang. Pengalaman kerja sangat diperlukan agar dapat menggunakan sistem informasi dengan baik. Semakin lama pengalaman bekerja seseorang pada bidang yang sama dan sesuai maka akan semakin baik pula kinerjanya dalam memanfaatkan sistem informasi dalam bidang pekerjaannya. Dengan demikian, pengalaman kerja juga memengaruhi efektivitas penggunaan sistem informasi secara positif (Widyantari & Suardhika, 2016; Vipraprastha & Sari, 2016).

Setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik seharusnya menyelenggarakan program pelatihan bagi para pengguna secara berkala dan kontinu dalam melaksanakan pengembangan suatu sistem informasi. Dengan adanya pelatihan tersebut, pengguna dapat mengidentifikasi prosedur penggunaan sistem informasi tersebut dengan benar dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Program pelatihan bagi pengguna bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem informasi, agar kinerja menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, adanya program pelatihan dapat mendorong tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut dan termotivasi untuk terus menggunakannya. Hal ini karena selain sistem informasi tersebut memang telah dikuasai dengan baik, pengguna juga meyakini sistem informasi tersebut akan dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat namun tetap teliti. Oleh karenanya, pelatihan diduga berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi (Dewi et al., 2019).

Selain itu, pemanfaatan sistem informasi juga dipengaruhi oleh insentif yang diterima oleh pengguna (Vipraprastha & Sari, 2016). Insentif menjadi faktor yang memengaruhi motivasi untuk meningkatkan kinerja individu dalam pemanfaatan sistem informasi. ASN diberikan gaji setiap bulan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Pemberian gaji tersebut merupakan hak bagi ASN oleh karena melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan. Selain gaji, terdapat pula insentif yang pada organisasi sektor publik dikenal dengan honorarium yang diterima setiap bulan karena

adanya suatu penugasan tertentu pada jam kerja. Sedangkan bagi aparatur yang bekerja di luar jam kantor maka disediakan uang lembur atau biaya makan lembur sebagai insentif tambahan di luar honorarium bulanan. Kinerja aparatur tentunya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara penghasilan yang diterima baik gaji, insentif, dan pendapatan lainnya yang diterima setiap bulan dengan beban kerja yang ditugaskan. Dalam penelitian ini insentif digambarkan dengan ukuran keseimbangan penghasilan dan beban sebagai motivasi yang dapat memengaruhi dan mendorong pemanfaatan *e-budgeting*.

Kinerja instansi tidak terlepas dari kualitas pimpinan yang mengayomi organisasi tersebut. Fungsi manajer salah satunya memberikan arahan dan dukungan bagi pencapaian tujuan organisasi. Pada organisasi sektor publik, manajer yang berhubungan langsung dengan bawahannya disebut sebagai atasan langsung. Atasan langsung staf adalah pejabat pengawas setingkat eselon IV, sedangkan atasan langsung pejabat pengawas adalah pejabat pembina setingkat eselon III. Adanya dukungan atasan langsung akan sangat membantu peningkatan kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas terutama terkait penggunaan sistem informasi sehingga dukungan manajer berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi (Satria & Dewi, 2019). Tanpa dukungan dari atasan langsung maka hampir mustahil staf atau bawahan dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Oleh karenanya, dukungan atasan langsung menjadi faktor penting lainnya dalam keberhasilan penerapan suatu sistem informasi.

Ukuran organisasi memiliki pengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi secara positif (Damana & Suardikha, 2016). Kriteria dari variabel ukuran organisasi yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah jumlah karyawan atau staf. Namun, indikator dalam penelitian yang digunakan bukanlah jumlah keseluruhan staf yang dimiliki oleh masing-masing SKPA, melainkan operator yang terlibat secara langsung dalam penggunaan *e-budgeting*. Pemilihan jumlah operator sebagai ukuran organisasi dipandang lebih tepat, karena jumlah operator *e-budgeting* merepresentasikan kuantitas SDM yang dimiliki SKPA dalam penggunaan *e-budgeting*. Jumlah *username* yang digunakan dalam *login* sistem informasi tidak menggambarkan jumlah operator yang menjalankan sistem informasi tersebut. *Username* dapat saja digunakan oleh lebih dari satu orang staf. Bahkan beberapa menu dan tahapan dalam sistem *e-budgeting* dapat diinput oleh dua orang atau lebih *user* dengan satu *username* dalam waktu bersamaan. Dari berbagai uraian

tersebut sebelumnya, selanjutnya disampaikan beberapa hipotesis, yaitu:

H₁: Pendidikan formal memengaruhi penerapan *e-budgeting*.

H₂: Pengalaman memengaruhi penerapan *e-budgeting*.

H₃: Pelatihan memengaruhi penerapan *e-budgeting*.

H₄: Keseimbangan penghasilan dengan beban kerja memengaruhi penerapan *e-budgeting*.

H₅: Dukungan atasan langsung memengaruhi

penerapan *e-budgeting*.

H₆: Jumlah operator memengaruhi penerapan *e-budgeting*.

Metode Analisis

Variabel terikat (*dependent variable*) penelitian ini adalah penerapan *e-budgeting* yang diukur dengan indikator prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab yang kemudian dikembangkan kembali dalam beberapa sub indikator, secara ringkas batasan definisi

Tabel 3. Definisi Operasional *Dependent Variable*

Indikator	Batasan Definisi Operasional	Satuan	Skala Jawaban
1 Tertib	Pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	0-10	Ordinal
	1.1 ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan penganggaran		
	1.2 kesesuaian pengusulan pengadaan barang/pekerjaan dengan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUnit)		
	1.3 kelengkapan bukti administrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran		
	1.4 kesesuaian tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan peraturan/ketentuan		
2 Efisien	Keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu	0-10	Ordinal
	2.1 kelengkapan RAB/HPS dan spesifikasi teknis dalam perencanaan dan penganggaran		
	2.2 kelengkapan KAK/ <i>Term of Reference (TOR)</i>		
	2.3 keseragaman penggunaan harga satuan barang/pekerjaan pada setiap program dan kegiatan dalam SKPA		
	2.4 rasio efisiensi anggaran yang merupakan perbandingan antara jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)		
3 Ekonomis	<i>Input</i> dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah	0-10	Ordinal
	3.1 ketepatan penentuan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Satuan Biaya (ASB)		
	3.2 kesesuaian harga satuan biaya operasional pada BTL maupun BL dengan Standar Biaya Umum (SBU)		
	3.3 kewajaran harga satuan barang/pekerjaan dengan survey harga pasar		
	3.4 rasio ekonomis anggaran yang merupakan perbandingan antara pagu anggaran yang ditargetkan untuk direalisasikan dengan total pagu anggaran		
4 Efektif	Pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan	0-10	Ordinal
	4.1 kesesuaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan		
	4.2 kesesuaian pagu program Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dengan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS)		
	4.3 kesesuaian pagu anggaran dalam PPAS dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA		
	4.4 rasio efektivitas anggaran yang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran dengan jumlah target realisasi		
5 Transparan	Pengumuman anggaran diketahui dan dapat diakses publik	0-10	Ordinal
	5.1 ketersediaan informasi Ringkasan DPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) SKPA pada situs resmi		
	5.2 ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada situs resmi		
	5.3 kesesuaian dokumen RUP yang diumumkan dengan DPA-SKPA		

6	Bertanggung jawab	Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan kebijakan	0-10	Ordinal
	6.1	kesesuaian program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Pemerintah Aceh dengan Rencana Strategis (Renstra)		
	6.2	kesesuaian program dan kegiatan dalam RKPA dengan Rencana Kerja (Renja) SKPA		
	6.3	kesesuaian program dan kegiatan dalam Renja SKPA dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA		

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

operasionalnya disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Pengukuran dilakukan dengan skala penilaian angka (*numeric rating scale*) antara 0-10 dan boleh bilangan pecahan, di mana angka 10 menunjukkan nilai terbaik. Hasil perolehan nilai akhir kemudian diinterpretasikan dalam tingkat kualitas berupa sangat buruk (0-2,00), buruk (2,01-4,00), kurang baik (4,01-6,00), baik (6,01-8,00), dan sangat baik (8,01-10). Adapun faktor-faktor yang diduga memengaruhi penggunaan *e-budgeting* dianalisis menggunakan model regresi linear berganda, yaitu:

$$Y_i = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + a_5X_5 + a_6X_6 + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

Di mana, Y_i merupakan penerapan *e-budgeting*, a_0 adalah konstanta, a_i adalah koefisien regresi dengan hipotesis $a_i > 0$ untuk semua i , X_1 adalah pendidikan formal (tahun), X_2 adalah pengalaman (tahun), X_3 adalah pelatihan (jumlah), X_4 adalah keseimbangan penghasilan dengan beban kerja (nominal), X_5 adalah dukungan atasan langsung (nominal), X_6 adalah jumlah operator *e-budgeting* (orang), dan ϵ adalah *error term*.

Adapun variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang digunakan dalam model di atas merupakan faktor-faktor yang diduga memengaruhi penerapan *e-budgeting*. Secara ringkas diuraikan dalam Tabel 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah serangkaian analisis terhadap data, diperoleh hasil berupa nilai pengelolaan keuangan melalui penerapan *e-budgeting* pada setiap SKPA. SKPA yang memiliki nilai tertinggi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan nilai sebesar 9,14. Perolehan nilai yang tinggi pada SKPA ini terutama pada prinsip efektif, yaitu sebesar 9,77 yang mengindikasikan bahwa pencapaian hasil program SKPA ini telah memenuhi target sasaran yang ditetapkan. Adapun tingkat kesesuaian hasil program dengan sasaran dan kesesuaian pagu program RKPA dengan KUA PPAS memiliki nilai masing-masing sebesar 9,00. Kesesuaian pagu anggaran dalam PPAS dengan DPA SKPA diperoleh nilai sebesar 9,93, di mana Pagu PPAS sebesar Rp299.034.411.831 dan Pagu DPA sebesar Rp296.851.267.830 (Pemerintah Aceh, 2019a). Rasio efektivitas anggaran juga menunjukkan angka yang baik, yaitu sebesar 10,00, di mana jumlah anggaran yang direalisasikan per 16 November 2020 sebesar Rp56.709.387.520 melebihi dari target realisasi yang direncanakan, yaitu sebesar Rp49.698.306.013. Namun demikian perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut dengan menggunakan data realisasi anggaran final per tanggal 31 Desember 2020. Data realisasi anggaran dalam penelitian ini merupakan data yang masih bersifat sementara karena belum tutup tahun

Tabel 4. Definisi Operasional *Independent Variables*

	Variabel	Batasan Definisi Operasional	Satuan	Skala Jawaban
1	Pendidikan formal	lamanya responden menempuh pendidikan formal	Tahun	Rasio
2	Pengalaman	lamanya masa kerja responden keseluruhan sejak pengangkatan pertama dan lamanya responden melaksanakan tugas terkait <i>e-Budgeting</i>	Tahun	Rasio
3	Pelatihan	jumlah frekuensi pelatihan/workshop/bimbingan teknis yang diikuti responden dalam mendukung tugas <i>e-budgeting</i>	Jumlah	Rasio
4	Keseimbangan penghasilan dengan beban kerja	keseimbangan antara penghasilan yang didapat dengan beban kerja yang diemban responden	(0=tidak seimbang,1=seimbang)	Nominal
5	Dukungan atasan langsung	tingkat dukungan atasan langsung dalam pelaksanaan tugas <i>e-budgeting</i>	(0=rendah, 1=tinggi)	Nominal
6	Jumlah operator	jumlah operator/staf yang menangani <i>e-budgeting</i> pada unit kerja responden	Orang	Rasio

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

anggaran serta belum dilakukan rekonsiliasi. Oleh karenanya memungkinkan terjadinya perubahan selama periode tahun berjalan. Terlepas dari itu, data yang digunakan tersebut dianggap cukup valid untuk mengukur rasio efektivitas anggaran.

Sementara itu, nilai yang terendah diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan nilai sebesar 6,02. Walaupun memperoleh nilai terendah di antara SKPA, namun nilai tersebut masih dalam kategori baik. Perolehan nilai terendah pada SKPA ini terutama pada prinsip efisiensi dengan nilai hanya sebesar 1,90 yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi anggaran, di mana alokasi pagu anggaran BTL yang peruntukannya untuk belanja pegawai dan operasional sebesar Rp4.833.146.200.006 lebih besar dibandingkan dengan BL, yaitu sebesar Rp177.662.580.000. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi anggaran pada SKPA ini masih rendah. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap rincian pagu anggaran pada Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub Aceh No. 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2020 didapati bahwa hal tersebut terjadi karena anggaran BTL pada SKPA ini tidak hanya untuk pembiayaan belanja pegawai saja sebesar Rp92.972.080.560 (1,92 persen), namun juga dialokasikan untuk belanja hibah sebesar Rp712.362.675.022 (14,74 persen), belanjabantuan sosial sebesar Rp15.818.350.000 (0,33 persen), belanja bagi hasil kepada pemerintahan prov/kab/kota dan desa sebesar Rp912.951.642.027 (18,89 persen), belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota, desa dan partai politik sebesar Rp2.980.215.904.489 (61,66 persen), dan belanja tidak terduga Rp118.825.547.908 (2,46 persen). Penempatan pembiayaan tersebut dilakukan pada BTL sehingga jumlah anggaran BTL menjadi lebih besar dibandingkan dengan BL yang seharusnya diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan riil yang menjadi sasaran SKPA. Oleh karenanya, pada masa mendatang perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap belanja mana saja yang masuk ke dalam BTL yang seharusnya diperuntukkan untuk belanja pegawai

SKPA. Di samping itu perlu kajian lebih lanjut tentang kesesuaian penempatan belanja hibah, bansos, bantuan keuangan lainnya, dan belanja tidak terduga, agar tidak menumpuk hanya pada satu SKPA saja serta yang lebih penting lagi adalah melihat sejauh mana korelasi dan daya ungkit pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja tersebut terhadap program, kegiatan, dan sasaran SKPA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

Selain dari penilaian terhadap masing-masing unit kerja SKPA, penilaian juga dapat dilihat berdasarkan kategori instansi. Kategori instansi merupakan bentuk organisasi perangkat daerah atau SKPA berdasarkan fungsi pelayanan dan struktur organisasi yang dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu dinas, lembaga teknis, dan sekretariat. Walaupun memiliki variasi nilai antara setiap kategori, namun tidak terdapat perbedaan yang mencolok secara umum antara nilai penerapan *e-budgeting* pada SKPA dengan kategori dinas, lembaga teknis maupun sekretariat. SKPA yang memiliki nilai tertinggi adalah SKPA dengan kategori dinas sebesar 7,75, kemudian disusul dengan kategori sekretariat sebesar 7,41 dan terendah adalah SKPA dengan kategori lembaga teknis sebesar 6,99. Hal ini mengindikasikan bahwa kriteria, tugas pokok maupun fungsi suatu unit kerja tidak menentukan pencapaian nilai pengelolaan keuangan, melainkan dideterminasi oleh sejauh mana SDM yang dalam unit kerja organisasi tersebut mau dan mampu mencapainya sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Adapun rekapitulasi nilai pengelolaan keuangan yang diperoleh SKPA berdasarkan kategori unit kerja ditampilkan dalam Tabel 5.

Jika dilihat Tabel 5, terlihat perbedaan karakter pada setiap kategori SKPA. Pada prinsip tertib, efisien, dan transparan, SKPA dengan kategori dinas memiliki nilai tertinggi dibandingkan dua kategori lainnya, yaitu dengan nilai secara berurutan sebesar 7,53; 7,31; dan 6,49. Namun, pada prinsip ekonomis dan efektif justru kategori sekretariat yang memiliki nilai tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 8,71 dan 9,06, sedangkan SKPA dengan kategori dinas berada dibawahnya. Sementara pada prinsip bertanggung jawab, nilai tertinggi diperoleh SKPA dengan kategori

Tabel 5. Nilai SKPA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kategori SKPA	Jumlah SKPA	Tertib	Efisien	Ekonomis	Efektif	Transparan	Bertanggung Jawab	Jumlah
Dinas	19	7,53	7,31	8,62	8,89	6,49	7,65	7,75
Lembaga Teknis	9	7,01	5,05	8,41	8,47	5,18	7,81	6,99
Sekretariat	6	6,89	6,47	8,71	9,06	5,58	7,77	7,41
Pemerintah Aceh	34	7,14	6,28	8,58	8,80	5,75	7,74	7,38

Sumber: Qanun Aceh No 12 Tahun 2019, Pergub Aceh No 39 Tahun 2019, Pemerintah Aceh (2019a) dan data primer (diolah 2020).

lembaga teknis, seperti badan-badan, BLUD rumah sakit, dan inspektorat.

Secara keseluruhan nilai pengelolaan keuangan pada Pemerintah Aceh melalui penerapan *e-budgeting* sudah baik, yaitu sebesar 7,38. Adapun indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah prinsip efektif sebesar 8,80 dan yang terendah adalah prinsip transparan sebesar 5,75. Upaya serius dalam meningkatkan prinsip transparansi perlu dilakukan. Transparansi tercermin dari ketersediaan informasi anggaran SKPA yang dapat diakses oleh publik berupa ringkasan DPA dan DPAP pada situs resmi SKPA maupun PPID Aceh. Berdasarkan pemeriksaan antara tanggal 22-25 November 2020, terdapat 11 SKPA (23,40 persen) yang tidak mengumumkan DPA dan DPAP, sedangkan 36 SKPA lainnya (76,60 persen) telah mengumumkan DPA dan DPAP dengan rincian, yaitu 7 SKPA pada situs resmi SKPA, 9 SKPA pada situs PPID dan 20 SKPA pada situs resmi SKPA dan PPID. Selain itu, transparansi juga ditunjukkan dari ketersediaan LAKIP SKPA pada situs resmi. SKPA tidak mengumumkan LAKIP tahun anggaran 2019 sebanyak 23 SKPA (48,94 persen), sedangkan 24 SKPA lainnya (51,06 persen) telah mengumumkannya. Transparansi terakhir juga dilihat dari pengumuman RUP yang ditayangkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Data diperoleh per 21 November 2020 bahwa dari total pagu anggaran Pemerintah Aceh Tahun 2020 sebesar Rp17.279.528.340.753, namun yang diumumkan hanya sebesar Rp5.289.300.263.537 (30,61 persen) sehingga terdapat anggaran sebesar Rp11.990.228.077.216 (69,39 persen) yang tidak diumumkan.

Analisis Faktor yang Memengaruhi Penerapan E-Budgeting

Uji asumsi klasik merupakan salah satu asumsi yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum melakukan analisis data penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun tujuan uji asumsi dimaksud di antaranya adalah untuk mengetahui kondisi data yang diperoleh selama dalam penelitian dan memastikan hasil penelitian yang disimpulkan adalah valid serta data yang diolah secara teori adalah tidak bias, konsisten, dan memiliki penaksiran koefisien regresi yang efisien (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan tiga pengujian asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan deteksi multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai tingkat signifikansi untuk semua variabel berada di atas 0,05 sehingga disimpulkan tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh adalah 0,2 yang nilainya berada di atas 0,05, yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Pada hasil uji multikolinieritas didapati bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih besar dari 10 persen dan nilai VIF untuk semua variabel dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Seperti telah dijelaskan pada metode bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-budgeting* dianalisis dengan model regresi linear. Hasil uji secara serempak (simultan) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$ (H_0 ditolak). Merujuk pada nilai tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu setidaknya terdapat satu variabel bebas (*independent*) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan uji secara parsial, hasil pendugaan model tersebut disajikan pada Tabel 6. Model regresi yang diduga

Tabel 6. Hasil Pendugaan Model Faktor yang Memengaruhi Penerapan *e-Budgeting*

Variabel	Deskripsi Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.hit	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
(Constant)	Konstanta	3,418	1,704		2,006	0,049
X_1	Pendidikan formal	0,086	0,077	0,134	1,115	0,269
X_2	Pengalaman	0,007	0,016	0,051	0,423	0,674
X_3	Pelatihan	0,049	0,084	0,070	0,582	0,563
X_4	Keseimbangan Penghasilan dengan Beban Kerja	0,222	0,188	0,153	1,176	0,244
X_5	Dukungan Atasan Langsung	0,520	0,212	0,317	2,454	0,017
X_6	Jumlah Operator	0,034	0,017	0,257	2,042	0,046

Keterangan: a Dependent Variable: y.

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) menunjukkan hasil cukup baik, yaitu semua variabel secara statistik bertanda positif sesuai hipotesis. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,437 yang berarti bahwa tingkat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya, yaitu sebesar 43,7 persen. Sementara sisanya sebesar 56,3 persen akan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian ini.

Hasil pendugaan model menunjukkan variabel pendidikan formal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Indikator pendidikan yang digunakan adalah skala penilaian rasio dalam satuan tahun tanpa memerhatikan latar belakang program studi yang diambil terutama pada tingkat pendidikan terakhir. Sebagaimana diketahui pada jenjang pendidikan SD sederajat sampai dengan SLTA sederajat, ilmu informatikahanyadijarkandalamsatumatapelajaran saja, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Demikian juga pada tingkat pendidikan tinggi yang tidak mengajarkan secara khusus penggunaan suatu sistem informasi, kecuali pada beberapa program studi atau jurusan yang subjeknya memiliki korelasi dengan manajemen informatika atau teknologi informasi. Namun demikian, terdapat beberapa materi ajar dalam kurikulum pada setiap level institusi pendidikan formal berkaitan dengan sistem informasi dan efektivitas penggunaannya. Oleh karenanya, tingkat pendidikan formal pengguna sistem informasi tidak cukup mampu memengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi tersebut. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Parnata et al. (2013) yang menyimpulkan sekalipun gender, usia, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara positif namun tidak cukup signifikan memengaruhi efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Anjani & Wirawati (2018) yang menyatakan variabel pengalaman kerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif sekaligus signifikan pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, sementara usia dan kompleksitas tugas berpengaruh negatif.

Variabel pengalaman didapati berpengaruh dengan arah positif namun juga tidak cukup signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Indikator pengalaman dalam penelitian ini menggunakan lamanya masa pengalaman kerja secara umum yang dimiliki oleh pengguna *e-budgeting*, bukan lamanya masa pengalaman kerja yang berhubungan dengan sistem informasi. Hasil yang tidak signifikan pada variabel pengalaman juga ditemui oleh Anggarani et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa hanya variabel pemanfaatan teknologi, pelatihan,

skill, dan partisipasi pemakai berpengaruh positif, sedangkan pengalaman kerja tidak memengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi. Pengalaman kerja pada masa lalu biasanya sebatas dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekalipun memiliki pengalaman kerja yang lama namun apabila tidak memahami sistem informasi yang saat ini dijalankan atau pengalaman dalam pengoperasian sistem informasi sebelumnya berbeda dengan yang digunakan saat ini maka tidak cukup memengaruhi kinerja sistem informasi tersebut. Temuan ini berbeda dengan hasil yang diperoleh Widyantari & Suardikha (2016) yang mengungkapkan bahwa semua variabel pengalaman kerja, pendidikan, program pelatihan dan partisipasi manajemen tidak hanya berpengaruh positif namun juga signifikan memengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi.

Selanjutnya variabel pelatihan menunjukkan hasil yang positif namun juga tidak signifikan memengaruhi penerapan *e-budgeting*. Justifikasi yang dapat dikemukakan terhadap ketidaksigifikannya variabel ini adalah karena tidak terlepas dari variasi terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Pada variabel pelatihan diketahui bahwa jumlah pelatihan terkait *e-budgeting* masih sangat sedikit diselenggarakan karena *e-budgeting* sendiri baru diterapkan satu tahun sehingga jumlah penyelenggaraan pelatihan juga terbatas hanya antara 1 hingga 4 kali selama setahun. Penyebab tersebut dapat diindikasikan ikut memengaruhi tingkat signifikansi pelatihan terhadap penerapan *e-budgeting* menjadi rendah. Hasil penelitian Kharisma & Juliarsa (2017) juga sama bahwa walaupun variabel pendidikan dan pelatihan pengaruh positif namun pengaruhnya tidak cukup signifikan pada pemanfaatan suatu sistem informasi akuntansi. Maliantari et al. (2021) juga menyimpulkan bahwa variabel program pelatihan, minat pengguna, dan kemampuan pemakai berpengaruh positif, sementara variabel umur dan pengawasan tidak memengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi. Demikian pula Permana & Suryana (2020) yang menyimpulkan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel *intervening* tidak mampu memperkuat variabel kemampuan teknik personal pada kinerja penggunaan sistem informasi akuntansi. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya baik oleh Dewi et al. (2019) maupun Damana & Suardikha (2016) yang menyimpulkan bahwa pengaruh variabel pelatihan pada variabel efektivitas sistem informasi akuntansi terdapat nilai yang positif dan signifikan. Kemudian Suartika & Whidiyani (2017) juga memperoleh kesimpulan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan memperkuat pengaruh variabel tingkat kemampuan

teknik personal terhadap efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Demikian juga hasil analisis variabel tingkat keseimbangan penghasilan dengan beban kerja yang menunjukkan nilai positif namun juga tidak signifikan. Penyebab terjadi hal ini diduga kuat karena jumlah honorarium dan insentif yang diterima oleh setiap responden hampir sama karena ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum dengan batas maksimal tertentu. Kebanyakan SKPA mengambil standar jumlah honorarium maksimal untuk dianggarkan. Hal ini tentu membuat tingkat perbedaan penghasilan menjadi tidak terpaut jauh antara satu sama lain. Sebagaimana diketahui bahwa besaran honorarium pada ASN diberikan dalam jumlah yang tetap setiap bulan tanpa memperhatikan jumlah jam dan hari kerja, besarnya beban kerja, dan waktu kerja efektif. Pemotongan atas honorarium juga tidak dapat dilakukan apabila ASN bersangkutan tidak masuk kantor atau tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini pada akhirnya membuat lemah daya dorong honorarium dan insentif lainnya sebagai motivasi dalam memanfaatkan sistem informasi *e-budgeting*.

Hasil yang sama juga diperoleh oleh Prariadena & Putra (2019) bahwa insentif atau honorarium memperlemah pengaruh variabel efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap tingkat kinerja karyawan, sementara motivasi kerja sebaliknya, yaitu memperkuat pengaruh variabel efektivitas sistem informasi tersebut. Berikutnya pada penelitian lain didapati bahwa insentif juga tidak secara langsung memengaruhi kinerja sebagaimana hasil penelitian Apriwandi (2018) yang membuktikan bahwa sistem *reward* dalam bentuk insentif berbasis kinerja tidak hanya mampu memengaruhi dimensi komitmen yang terdiri dari afektif, berkelanjutan, dan normatif, namun juga memengaruhi dimensi *self-efficacy*. Selanjutnya dimensi komitmen dan dimensi *self-efficacy* tersebutlah yang memengaruhi motivasi tugas. Sementara variabel motivasi tugas dan kinerja memiliki hubungan yang positif. Hal tersebut berbanding terbalik pada organisasi sektor swasta, di mana penetapan insentif maupun bonus sangat ditentukan oleh kinerjanya masing-masing dengan perhitungan secara akumulasi pada akhir periode sehingga jumlah insentif masing-masing karyawan yang diterima akan berbeda-beda pula. Tingginya perbedaan jumlah insentif atau bonus antara karyawan swasta yang satu dengan lainnya membuat variasi ini juga semakin besar.

Oleh karenanya, penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan Vipraprastha & Sari (2016) yang menemukan bahwa tidak hanya tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan, namun insentif

juga ikut memengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi secara positif dan signifikan. Demikian juga halnya penelitian Pragaswari & Widhiyani (2020) yang menyimpulkan bahwa variabel insentif dan variabel kepuasan pengguna dapat mendorong peningkatan kinerja suatu sistem informasi akuntansi, sementara variabel stres kerja sebaliknya dapat menurunkan kinerja sistem tersebut.

Berbeda halnya dengan variabel dukungan atasan langsung dan jumlah operator. Nilai signifikansi variabel dukungan atasan langsung terlihat adalah $0,017 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresinya bernilai sebesar 0,520. Hal ini menunjukkan dukungan atasan langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-budgeting* yang berarti hipotesis diterima dan sesuai dengan hasil penelitian Satria & Dewi (2019) yang menyimpulkan bahwa variabel dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi baik secara parsial maupun simultan. Dewi & Idawati (2019) menemukan hasil yang sama bahwa variabel dukungan *top management*, keterlibatan pengguna, dan kapabilitas SDM, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Abhimantra & Suryanawa (2016) juga mendapati bahwa terdapat pengaruh positif dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Begitu pula dengan nilai signifikansi variabel jumlah operator, yaitu bernilai $0,046 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresinya sebesar 0,034. Hasil ini menunjukkan variabel jumlah operator yang dimiliki oleh suatu unit kerja memiliki pengaruh positif sekaligus signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*, yang berarti hipotesis ini juga diterima dan mendukung penelitian sebelumnya oleh Damana & Suardikha (2016) yang membuktikan ukuran organisasi dalam hal ini jumlah personel memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Namun demikian, jumlah operator *e-budgeting* pada masing-masing SKPA menurut responden dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Hal tersebut juga didukung oleh data dari rata-rata frekuensi penggunaan *e-budgeting* pada operator sebanyak 2,82 kali per hari dan rata-rata lamanya penggunaan setiap hari adalah 5,21 jam. Apabila waktu efektif bekerja dalam sehari bagi ASN, yaitu delapan jam per hari maka lebih dari setengah waktu efektif tersebut dihabiskan untuk melaksanakan tugas *e-budgeting*. Apabila pada sistem informasi yang bersifat opsional maka tingginya frekuensi dan durasi penggunaan menunjukkan pengguna merasa puas terhadap

sistem informasi. Namun pada *e-budgeting*, tingginya frekuensi dan durasi penggunaan *e-budgeting* justru mengindikasikan minimnya jumlah operator yang dimiliki SKPA. Hal ini dikarenakan *e-budgeting* merupakan sistem informasi yang bersifat mandatori dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kewajiban untuk menggunakannya, bukan sistem informasi yang dapat dipilih untuk dipakai atau tidak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan atasan langsung dan juga jumlah operator *e-budgeting* menjadi dua variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Sementara, empat variabel lainnya, yaitu pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Semakin tinggi dukungan atasan langsung dan semakin banyak jumlah operator maka dapat meningkatkan penerapan *e-budgeting*. Secara statistik peningkatan penerapan *e-budgeting* terjadi sebesar 0,520 dan 0,034 untuk masing-masing kedua variabel tersebut. Apabila dukungan atasan langsung naik sebesar satu poin, sementara variabel lainnya, yaitu pendidikan, pengalaman, pelatihan, keseimbangan penghasilan dengan beban kerja, dan jumlah operator diasumsikan tetap maka nilai penerapan *e-budgeting* mengalami peningkatan sebesar 0,520. Apabila jumlah operator bertambah sebesar satu orang maka terjadi kenaikan nilai penerapan *e-budgeting* sebesar 0,034 dengan anggapan variabel lain, yaitu pendidikan, pengalaman, pelatihan, keseimbangan penghasilan dengan beban kerja, dan dukungan atasan langsung adalah konstan.

KESIMPULAN

Penerapan *e-budgeting* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh sudah baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah prinsip efektif dan terendah adalah prinsip transparan. Upaya serius perlu dilakukan dalam meningkatkan prinsip transparansi, yaitu dengan melakukan penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu SKPA sehingga semua SKPA dapat mengumumkan informasi ringkasan DPA, DPAP, dan laporan LAKIP pada situs resmi secara tepat waktu serta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada sistem SIRUP yang sesuai dengan anggaran dalam DPA. Upaya ini menjadi penting agar publik dapat lebih mudah dan leluasa dalam mengakses informasi pengelolaan keuangan di daerah.

Variabel dukungan atasan langsung dan variabel jumlah operator dengan analisis regresi linier

berganda terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Pengaruh positif tersebut menyebabkan peningkatan penerapan *e-budgeting* secara statistik sebesar 0,520 dari dukungan atasan langsung dan 0,034 dari penambahan jumlah operator untuk penerapan *e-budgeting* dengan asumsi semua variabel lainnya konstan atau tetap. Sementara variabel bebas lainnya yaitu pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga terbukti memiliki pengaruh positif sesuai hipotesis namun sayangnya tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5 persen. Oleh karenanya, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Aceh, yaitu (1) Meningkatkan pemahaman manajerial atasan langsung melalui bimbingan teknis manajerial dan implementasi peraturan perundangan pada tataran pejabat pengawas dalam rangka memaksimalkan dukungan bagi kelancaran tugas *e-budgeting*, dan (2) Melakukan penyesuaian kebutuhan operator *e-budgeting* SKPA baik melalui penambahan jumlah maupun distribusi staf antarbidang dalam satu SKPA dan atau lintas SKPA. Namun demikian, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang komprehensif tentang analisis beban kerja ASN yang bertugas sebagai operator *e-budgeting* agar jumlah ideal pada suatu unit kerja dapat dicapai.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu responden yang digunakan adalah Kasubbag Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat SKPA yang merupakan pejabat eselon IV atau pejabat pengawas yang menangani fungsi perencanaan/penganggaran pada SKPA dan operator *e-budgeting* sebagai admin sistem informasi pada SKPA. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang diduga juga ikut memengaruhi penerapan *e-budgeting* namun tidak masuk dalam penelitian ini, seperti penilaian kinerja, kepastian tugas, waktu penyelesaian tugas (WPT), besaran anggaran, dan sarana prasarana. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat melibatkan responden pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu pejabat eselon III dan atau eselon II yang merupakan pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Di samping itu, penambahan beberapa variabel bebas yang menjadi faktor pengaruh penerapan *e-budgeting* akan memperkaya informasi yang disajikan dan memberikan hasil yang lebih baik dengan analisis yang lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik Aceh. (2020). *Statistik keuangan daerah Provinsi Aceh 2018-2019*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Suwanda, D. (2019). *Good governance pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Abhimantra, W.P., & Suryanawa, I.K. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1782-1809.
- Anjani, P.W. & Wirawati, N.G.P. (2018). Pengaruh usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas pengguna sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2430-2457.
- Anggarani, N.P.T., Arizona, I.P.E., & Ernawati, N.P.L. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, pelatihan, skill, dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 380-390.
- Apriwandi. (2018). Apakah umpan balik dan insentif masih penting bagi karyawan non manajemen? (Studi Laboratori Eksperimen). *Jurnal Ilman*, 6(1), 12-25.
- Damana, A.W.A., & Suardikha, I.M.S. (2016). Pengaruh keterlibatan pemakai, pelatihan, ukuran organisasi dan keahlian pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1452-1480.
- Dewi, I G.A.R.P., & Idawati, P.D.P. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *Forum Manajemen*, 17(2), 1-11.
- Dewi, L.E.P., Dewi, P.E.D.M., & Julianto, P. (2019). Pengaruh program pelatihan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (Studi pada BPR di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(2), 13-21.
- Fajri, R.N., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis pengaruh penerapan sistem informasi keuangan, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Balance*, 16(1), 64-83.
- Kharisma, I.A.M., & Juliarsa, G. (2017). Pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan pemakai, pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(3), 2527-2555.
- Maliantari, K.H., & Arizona, I.P.E. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi. *Karma*, 1(1), 271-279.
- Nasution, D.A.D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D.A.D., & Atika. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D.A.D., & Ramadhan, P.R. (2019). Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-663.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal TECHNOBIZ*, 3(5), 25-30.
- Parnata, I.K., Faradhi, L., & Suciwati, D.P. (2013). Pengaruh gender, umur, pengalaman, tingkat pendidikan dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada rumah sakit di Kota Denpasar. *Jurnal Valid*, 10(4), 9-16.
- Permana, G.P.L., & Suryana, I.W.A. (2020). Pengaruh keterlibatan pemakai dan kemampuan teknik personal pada kinerja sistem informasi akuntansi dengan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel pemoderas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 50-66.
- Pragaswari, D.D., & Widhiyani, N.L.S. (2020). Stres kerja, insentif, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1233-1246.

- Priadiena, C.H., & Putra, I.M.P.D. (2019). Pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi pada kinerja karyawan dengan insentif dan motivasi kerja sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2376-2405.
- Rahman, R.A.T., Irianto, G., & Rosidi (2018). Analisis implementasi e-budgeting dengan menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 12(2), 53-63.
- Satria, P.A., & Dewi, P.P. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (Studi kasus pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4(1), 81-95.
- Suartika, K.A., & Whidiyani, N.L.S. (2017). Kemampuan teknik personal pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dengan pendidikan dan pelatihan sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1485-1512.
- Suryaningrat, A.A.A.M., & Utama, I.M.S. (2018). Analisis penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 23(1), 1-16.
- Vipraprastha, T., & Sari, M.M.R. (2016). Pengaruh faktor-faktor kinerja individual karyawan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1826-1855.
- Widyantari, N.W.L., & Suardhika, I.M.S. (2016). Pengaruh pelatihan dan pendidikan, pengalaman kerja dan partisipasi manajemen pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1546-1574.
- Sumber Lain**
- Pemerintah Aceh. (2019a). Nota kesepahaman Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2019b). Laporan kinerja Pemerintah Aceh tahun 2019. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2020). Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh No. 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.
- Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.